

## **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)**

**Moh. Daud Marasabessy\*, Idris Rumodar**

*Universitas Darussalam Ambon, Ambon, Indonesia<sup>1,2</sup>*

e-mail : [aufarmarsy001@gmail.com](mailto:aufarmarsy001@gmail.com),\* [idrisrumodar646@gmail.com](mailto:idrisrumodar646@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah terhadap dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat kota Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1). Wawancara mendalam 2). Observasi dan 3) Dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui instrumen yang digunakan agar mudah dibaca dan dipahami. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang terindikasi belum optimal adalah aspek Sumberdaya yaitu sarana penunjang yaitu kendaraan pengangkut sampah yang masih kurang memadai jika dibandingkan dengan besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika dilihat Dari efektivitas pelaksanaan sudah baik, namun kurang efisien karena dari segi waktu penyelesaian masih belum sesuai harapan*

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Dampak Sosial*

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan dalam hal pengelolaan sampah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan jika memang kita tidak ingin wilayah kita menjadi lautan sampah. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah, seperti mencanangkan program 3R yakni *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* perwujudan program ini bergantung pada partisipasi masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah sampah yakni mensosialisasikan pengelompokan sampah, Namun entah kenapa cara ini tidak pernah berhasil di Indonesia. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dirasakan menjadi persoalan utama. Masyarakat masih menyepelekan masalah sampah ini terbukti dengan masih banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan menjadi tercemar. Dalam kehidupan masyarakat Kota Ambon, masalah sampah telah berada pada titik krusial. Hampir semua sudut Kota Ambon dipenuhi oleh sampah sehingga dapat dikatakan sampah telah menjadi kompetitor utama masyarakat dalam menempati ruang kota ini. Ditambah masalah lingkungan lainnya, dapat terjadi komplikasi masalah lingkungan di Kota Ambon yang akan mengancam kehidupan di kota ini pada waktu mendatang. Ironisnya, di tengah gencarnya upaya Pemerintah Kota Ambon dalam menanggulangi masalah sampah, frekuensinya justru semakin meningkat.

Perda no 11. Tahun 2015 Pasal 7. Yang menjelaskan bahwa, (1) Pemerintah daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat: a. rencana pengurangan sampah; dan b. rencana Penanganan sampah. (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. target pengurangan sampah; b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA; c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat; d. kebutuhan penyediaan

pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah dan pasal 8. (1) Pengelolaan Sampah dalam peraturan daerah ini meliputi: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Banyaknya sampah yang ada di Teluk Ambon karena warga dan para pedagang di Pasar Mardika dan Batu Merah kerap membuang sampah ke laut khususnya para pedagang ini belum sadar. Mereka masih membuang sampah ke laut meski sosialisasi terus dilakukan. Sampah-sampah yang dipungut para petugas kebersihan itu kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir di kawasan Passo, Kecamatan Baguala. Banyaknya sampah di Teluk Ambon membuat petugas kebersihan kerap kewalahan.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan dalam hal pengelolaan sampah sehingga sampah di Pasar Mardika Desa Batu merah masih terlihat mengganggu aktifitas sosial masyarakat Kota Ambon.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kebijakan

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan (George C. Edward III,

2011:96-110). Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan.

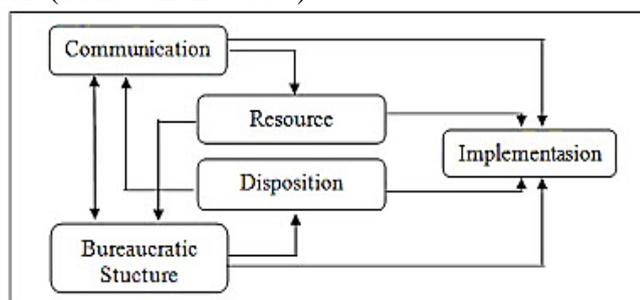
Anderson, James E, (2003), memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah.

### Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah

perencanaan sudah dianggap sempurna. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Nurdin Usman mengemukakan “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman. 2002:70). Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. (Setiawan. 2004:34).



Sumber: Widodo, 2011:107

### Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhinya. Menurut Merile S. Grindle faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup diantaranya, pertama, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target group, ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,

dan yang keempat, apakah letak sebuah program sudah tepat. Sementara, Variabel lingkungan kebijakan diantaranya yaitu, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Untuk mengakaji lebih jauh tentang Implementasi Kebijakan, maka saya lebih menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Karena ada beberapa faktor penting dalam teori Edwar ini yang sangat menjelaskan secara detail tentang faktor-faktor yang sangat mempengaruhi suatu proses implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan. namun yang saya katakan, saya lebih menggunakan Model Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2012:149). Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan penyusunan suatu data, kemudian di usahakan adanya analisis dan penafsiran data (J. Lexy Moleong 2013). Penelitian ini dilakukan di Pasar Mardika Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau dikarenakan pengamatan peneliti mengenai masalah sampah di Pasar Mardika yang terlihat begitu banyak tumpukan yang membawa dampak baruk bagi lingkungan dan juga tak indah di pandang mata. Untuk memudahkan peneliti menugumpulkan data, maka peneliti menggunakan informan kunci serta informan tambahan dengan mengambil sampel dari beberapa populasi yang dijadikan infoman dalam penelitian ini

Adapun sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: data primer yaitu sumber data yang langsung di dapatkan atau diperoleh dari responden atau sumber data tersebut pada lokasi penelitian dan Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat kita peroleh lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya kepustakaan internet, serta Untuk memperoleh data pada lokasi penelitian maka teknik pengumpulan yang digunakan adalah Observasi, Observasi adalah cara pengumpulan data yang di lakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan di mana suatu keadaan, atau situasi benar-benar terjadi dan wawancara, Wawancara di lakukan secara bebas oleh peneliti di lapangan terhadap objek serta Dokumentasi, yakni sebuah cara yang di lakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pengambilan sumber-sumber informasi, Data yang dikumpulkan diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, data-data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan sehingga mudah dibaca dan dipahami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Letak Pasar Mardika**

Pasar Mardika ini sudah sejak dulu menjadi bagian penting aktifitas ekonomi Kota Ambon dan memberikan ruang bagi segenap warga Ambon untuk melakukan perdagangan. Pasar Mardika adalah salah satu pasar yang cukup tua di Kota Ambon, Pasar Mardika adalah tempat terlengkap bagi warga Ambon dan sekitarnya untuk melakukan proses transaksi antara penjual dan pembeli. Pasar mardika juga disebut sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Maluku dan juga sebagai pasar favorit bagi orang Maluku pada umumnya dan warga masyarakat Kota Ambon Pada Khususnya. Pasar ini sudah sejak dulu menjadi bagian penting aktifitas ekonomi Kota Ambon dan memberikan ruang bagi segenap warga Ambon untuk melakukan perdagangan. Walaupun pasar Mardika adalah pasar yang cukup tua di Kota Ambon, namun Wilayah Pasar Mardika adalah tempat terlengkap bagi warga Ambon untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan hingga penunjang hidup seperti perkakas, pakaian, bahkan jasa perbankan.

Keberadaan Pasar Mardika tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan warga Ambon. Kondisi tradisional yang masih dipertahankan di pasar ini

justru menjadi kelebihan yang dimiliki tempat ini di tengah serbuan berbagai pusat perbelanjaan modern yang menjamur hampir di banyak kota besar Indonesia. Bagi warga Ambon, Pasar Mardika seperti rumah nenek yang akan selalu membawa mereka kembali sekalipun hal-hal yang berbau modern tengah melanda generasi kekinian. Pasar Mardika terletak di bagian utara kota Ambon, tepatnya dekat dengan berbagai fasilitas kota seperti Pelabuhan, Alun-alun dan kantor-kantor pemerintahan. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar di bawah ini :

Peta Lokasi Pasar Mardika Kota Ambon



Kebijakan pengelolaan persampahan berdasarkan peraturan daerah No.11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan dan Perda No 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Persampahan atau Kebersihan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Ambon dan berdasarkan peraturan Wali Kota Ambon. Guna menjujung terwujudnya Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang pelayanan persampahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih.

Pada penelitian ini, penulis akan

membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Kota Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan hasil observasi dilapangan secara mendalam berdasarkan teori George Edward III. Teori George Edward III ini terdiri dari 4 faktor soal Implementasi Kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Biokrasi atau Struktur.

#### **b. Komunikasi**

Dalam implementasi kebijakan, diperlukan peran yang sangat penting dari berbagai pihak yang terkait. Walaupun ada salah satu pihak yang menjadi tumpuan atau pelaksana utama, tapi tentu akan membutuhkan pihak lain supaya tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Adanya pihak-pihak yang saling membantu untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan tidaklah cukup apabila komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat tidak maksimal. Komunikasi harus terjalin dengan baik apabila suatu kebijakan ingin terrealisasi dengan optimal. Aktivitas yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus dilakukan secara bersama-sama agar tingkat hambatan dan kesulitan saat proses implementasi semakin kecil.

Dalam hal ini, Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon merupakan pelaksana utama untuk menerapkan kebijakan atau Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah dengan baik. Tentunya Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan harus menjalani hubungan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang ada.

Untuk mengetahui komunikasi yang baik antar Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dengan pihak-pihak yang membantu dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Mardika, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak La Anto (masyarakat atau pedagang pasar mardika) yang mengatakan bahwa :

*“kalau seingat beta, pemerintah dong pernah lakukan komunikasi kepada masyarakat yang ada dipasar mardika sini terkait Perda yang mengatur soal sampah dan dong himbaukan untuk masyarakat jang buang sampah sembarangan, dong sampaikan komunikasi itu lewat cara sosialisasi dan dong sebarkan beberapa selebaran kepada masyarakat tentang larangan jangan membuang sampah sembarangan”*. (wawancara, 10 Agustus 2021)

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari

bapak Andri (pegawai DLHP Kota Ambon) yang mengatakan bahwa :

*“katong dari dinas sudah pernah melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat yang ada di pasar mardika soal Perda yang mengatur tentang pengelolaan dan pendistribusian sampah dan juga dikomunikasikan melalui beberapa media yang turut untuk membantu menyebarkan Perda tentang sampah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon”*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, soal komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon kepada masyarakat dalam hal mengimplementasikan kebijakan terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Persampahan cukup baik, karena tidak adanya berselisih pendapat antara Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat yang ada di pasar mardika dalam hal penerapan kebijakan pengelolaan dan pendistribusian sampah.

### **c. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang memadai dan cukup implementasi suatu kebijakan akan terganggu dan akan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya yang ada pada pembuat dan pelaksanaan kebijakan haruslah cukup dan memadai sesuai apa yang tertera dalam peraturan. Selain itu, pihak pembuat dan pelaksanaan kebijakan harus menggunakan sumber daya yang secara cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas mengenai sumber daya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

#### **c.1. Manusia**

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses implementasi. Apabila sumber daya manusia dalam hal mengelola suatu kebijakan masih kurang dalam jumlah, maka penerapan suatu

kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan suatu penerapan kebijakan secara maksimal.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dewi (pegawai DLHP Kota Ambon) mengenai jumlah sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas pengangkut sampah di Kota Ambon sebagai berikut :

*“katong dari dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sudah melakukan pembagian tugas atau pembagian kerja untuk kelompok pengangkut sampah, biasanya kalau satu kelompok itu terdiri dari 4-5 orang dan itu dilakukan sesuai jadwal dan tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh dinas”*.

Pernyataan di atas, didukung pula oleh Bapak Jon (petugas pengangkut sampah) mengatakan sebagai berikut :

*“katong sudah diberikan tugas oleh dinas untuk mengangkut sampah dan itu biasanya katong terdiri dari 3-4 orang dalam satu oto pengangkut sampah dan katong hanya ditugaskan untuk mengangkut sampah yang ada di pasar mardika”*.

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hal penerapan kebijakan soal pengelolaan sampah dengan baik, jumlah sumber daya manusia dalam hal pengangkut sampah sudah terpenuhi, karena adanya kerjasama yang baik antara pegawai dan petugas pengangkut sampah.

#### **c.2 Finansial**

Finansial merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya dengan manusia. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabilitas telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka, memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, yaitu dengan bapak Andri untuk memperdalam sumber daya finansial dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon soal pengelolaan dan pendistribusian persampahan mengatakan sebagai berikut :

*“kalau untuk petugas dan dana operasional pengangkutan persampahan di lapangan, khususnya petugas yang punya tanggungjawab mengangkut sampah di pasar mardika dan beberapa pengangkut sampah di titik yang lain sudah dianggarkan oleh*

*bidang keuangan DLHP Kota Ambon termasuk uang makan, minum dan bahan bakar''*

Namun pernyataan diatas tidak sesuai dengan penerapan kebijakan pendistribusian dilapangan. Dalam hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat/pedagang, yaitu dengan Ibu Tati yang mengatakan sebagai berikut :

*''katong pedagang yang bajual di pasar mardika ini, setiap hari katong bayar iuran perorang itu Rp. 1000,00 kepada petugas pengangkut sampah dan kalau dikalikan satu bulan itu berarti perorang atau pedagang itu sebesar Rp. 30.000,00 dan dikalikan jumlah keseluruhan pedagang yang bahkan sampai ratusan pedagang yang bajual di sini, kira-kira berapa besar pajak atau iuran yang diterima oleh pemerintah Kota Ambon ''.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya finansial yang dioperasionalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon belumlah maksimal dalam hal pengelolaan dan pendistribusian sampah di pasar mardika. Faktanya, Pemerintah masih memberikan beban kepada masyarakat untuk harus membayar iuran agar sampah setempat bisa dikelola oleh pemerintah. Tentu hal ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan implementasi kebijakan itu sendiri. Inilah yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan.

#### **d. Waktu**

Waktu merupakan sumber daya waktu terakhir yang sama pentingnya dengan sumber daya yang sebelumnya. Waktu akan mempengaruhi tingkat kesulitan pelaksanaan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidak berhasilannya implementasi kebijakan.

Selain itu waktu juga berbicara mengenai jam kerja pegawai dan petugas serta masyarakat apakah sesuai atau justru tidak sesuai dengan penerapan kebijakan yang diterapkan.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Tomi (petugas pengangkut sampah) mengenai sumber daya waktu setiap kali melakukan aktifitas pengangkutan sampah, menyatakan sebagai berikut :

*''katong biasanya angkut sampah itu mulai dari jam 05:00 sampai jam 09:00 Wit. dan nanti ada petugas lain yang punya tugas untuk angkut sampah mulai dari jam 09:00 sampai 14:00 Wit''.*

Namun peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Jon yang juga salah satu petugas pengangkut sampah menyatakan bahwa :

*''katong biasanya mengangkut sampah itu sesuai dengan jam kerja, namun yang menjadi kendala dilapangan adalah masyarakat dong buang sampah sembarangan atau tidak tepat jam pembuangan sampah sehingga membuat katong kewalahan''.* (wawancara, 15 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa waktu jam kerja petugas pengangkut sampah sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat soal pembuangan sampah yang tidak tepat sasaran. Sehingga proses pengangkutan sampah pun menjadi tumpang tindih. Hal yang sama kalau kita perhatikan masyarakat atau pedagang yang ada di pasar mardika memang pada umumnya mereka membuang sampah itu kadang-kadang tidak sesuai pada jamnya.

#### **e. Disposisi atau Sikap**

Didalam mengelola suatu kebijakan tentu masalah persoalan sikap sangat berpengaruh penting dalam menentukan hasil suatu kebijakan itu dapat terlealisasikan. Disposisi terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) yaitu pengangkatan birokrasi menjelaskan tentang pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan insentif merupakan teknik yang digunakan untuk mengatasi permasalahan terhadap sikap para pelaksana kebijakan yang dilakukan dengan memberikan penghargaan baik berupa uang atau hal lain.

Sesuai dengan hasil peneliti pada saat proses wawancara dengan salah satu informan yaitu, dengan

bapak Dewi (Pegawai DLHP), menyatakan bahwa :

*“kalau persoalan pengelolaan persampahan merupakan kebijakan yang dijadikan prioritas utama pemerintah daerah, hanya saja dalam pelaksanaannya sikap komitmen terhadap keberhasilan pelaksana tidak semua memiliki komitmen yang tinggi, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini harus ada kerjasama antara semua pihak, baik dari dinas maupun dengan petugas pengelolaan sampah dan pengangkut sampah yang ada”*.

Pernyataan diatas, dapat pula didukung dengan pernyataan bapak Andri yang juga merupakan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengatakan bahwa :

*“semua komponen baik pimpinan pegawai/tenaga kerja mendukung sepenuhnya terhadap implemantasi kebijakan pengelolaan persampahan. Namun, pada saat dilapangan kurangnya kesadaran atau sikap yang baik dari setiap pihak yang terlibat didalam menjalankan kebijakan ini”*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, untuk keinginan merealisasikan suatu kebijakan tentang pengelolaan sampah semua pihak ingin mendukung. Namun pada saat kebijakan itu diterapkan dilapangan ternyata masih kurang kesadaran atau sikap yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam persoalan pengelolaan dan pendistribusian persampahan.

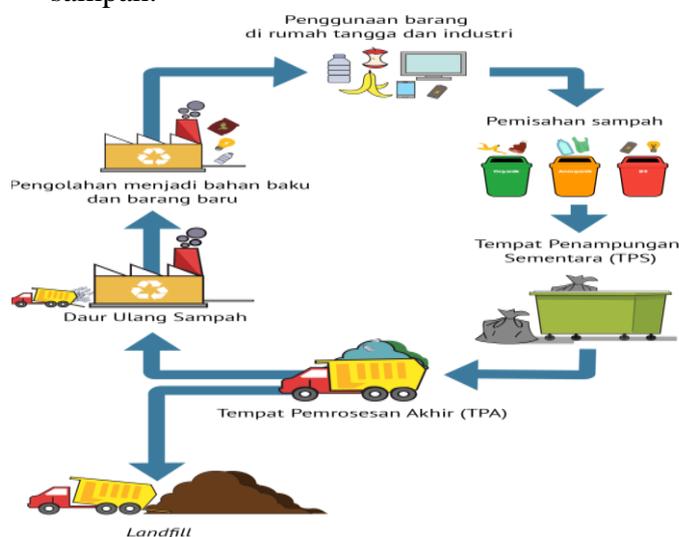
#### f. Struktur Birokrasi

Pada prinsipnya struktur birokrasi adalah suatu organisasi yang bersifat hierrarkhis yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Didalam merealisasikan suatu bentuk implementasi kebijakan tentu diperlukan suatu kordinasi dan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab.

Pada umumnya tiap-tiap organisasi atau lembaga pemerintahan, terdapat aspek

penting yang harus diperhatikan yaitu adanya standard operating procedures (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak. Selain itu, pada struktur birokrasi terdapat dimensi fragmentation yang merupakan organisasi pelaksana yang telah terpecah pecah menjadi distorsi dalam suatu pelaksanaan kebijakan.

Olehnya itu, struktur birokrasi sudah jelas menunjukkan bahwa tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan sudah tertata dengan baik dan jelas. Dan dari hubungan seperti ini, saya menyimpulkan bahwa Untuk standar operasional prosedur dilapangan telah tersedia dan dipahami oleh petugas pelaksana pengangkut sampah dan SOP telah dijalankan oleh pegawai dan petugas pengangkut sampah.



**Gambar 3. Alur TPA Sampah yang ada di Pasar Mardika Kota Ambon**

#### KESIMPULAN

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilihat dari fokus penelitian yaitu : 1) Proses implementasi kebijakan yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 2) Implementasi kebijakan pengelolaan persampahann di Pasar Mardika Kota Ambon yang dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

- 1) Proses implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Mardika dilihat dari empat aspek : komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dengan kelompok sasaran), Sumber Daya (ketersediaan dan ketercukupan SDM dan Sumber Daya Finansial), Disposisi (kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan), Struktur

Birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). Dari empat aspek tersebut yang terindikasi belum optimal adalah aspek Sumber Daya yaitu fasilitas pendukung yakni kendaraan pengangkut sampah, yang dirasakan masih kurang memadai jika dibandingkan dengan banyaknya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya.

- 2) Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Mardika yang dilihat dari keefektifan pelaksanaannya sudah baik, namun belum cukup efisien karena dari segi waktu penyelesaiannya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melakukan pengusulan anggaran untuk penambahan fasilitas pendukung berupa kendaraan pengangkut sampah di Pasar Mardika Kota Ambon untuk dianggarkan dalam APBD.
- 2) Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan, maka pemerintah kota khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk meninjau kembali letak TPS di Pasar Mardika agar mudah dijangkau oleh masyarakat, dan disarankan perlu dilakukan penambahan TPS.

### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Riduan. 2021. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah* (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan), *Bintang*

*Madani* 2021.

- Anderson, James E, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Dodik Ridho Nurrohmat, Dudung Darusman, Meti Ekayani. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan* (Teori dan Implementasi). *IPB Press* 2016/2017.
- Dr. Riani Nugroho. 2018. *Kebijakan Publik : Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. *PT Elix Media Komputindo, Jakarta* 2018.
- George III Edward 1980, *Implementasi Publik Policy*, Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon, *Nomor 11 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon, *Nomor 5 Tahun 2013, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persa
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offse
- Wardhana, Wisnu Arya. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta. Andi Offset.